

PEMIKIRAN HASAN MUHAMMAD TIRO TENTANG NEGARA



SKRIPSI

**DIAJUKAN PADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
ADE RAHMAN SIDIK
01371115**

PEMBIMBING

- 1. H. MUHAMMAD NUR, S.Ag., M.Ag.**
- 2. H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M.Ag.**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Ade Rahman Sidik

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Ade Rahman Sidik
NIM : 01371115
Judul Skripsi : **"Pemikiran Hasan Muhammad Tiro Tentang Negara"**

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharapkan segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 12 Shafar 1428 H
02 Maret 2007 M

Pembimbing



H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 282 522

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Ade Rahman Sidik

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Ade Rahman Sidik
NIM : 01371115
Judul Skripsi : **"Pemikiran Hasan Muhammad Tiro Tentang Negara"**

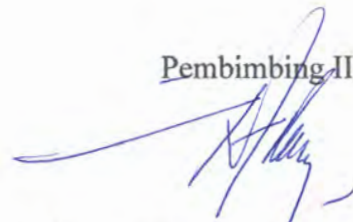
sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharapkan segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 12 Shafar 1428 H
02 Maret 2007 M

Pembimbing II



H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 282 520

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

"Pemikiran Hasan Muhammad Tiro Tentang Negara"

Yang disusun oleh :

Ade Rahman Sidik

01371115

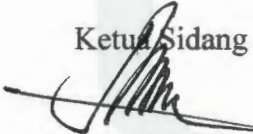
Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 11 April 2007 M/ 23 Rabiul Awal 1428 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 23 Rabiul Awal 1428 H
11 April 2007 M

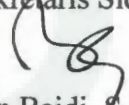


Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150 260 055

Sekretaris Sidang


Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 150 286 404

Pembimbing I


H. Muhammad Nur, S.Ag, M. Ag.
NIP. 150 282 522

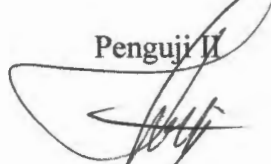
Pembimbing II


H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag.
NIP. 150 282 520

Penguji I


H. Muhammad Nur, S.Ag, M. Ag.
NIP. 150 282 522

Penguji II


Siti Fatimah, SH, M. Hum.
NIP. 150 260 463

Motto

*"Tidak Ada Kegagalan Jika Kau Terus Berusaha"
"Untuk Itulah,
"Akan Aku Rubah Dunia Ini
Dengan Kesabaranku"*

Persembahan

Kehadapan merekalah karya yang sederhana ini kupersembahkan

*Kelua orang tuaku
Yang senantiasa sabar mengajari arti kehidupan untuk masa depanku,
yang selalu membimbingku dengan kasih sayangnya,
serta senantiasa memberikan harapan dengan do'anya.*

*Kakak-kakakku beserta seluruh keluarganya yang senantiasa menyayangi dan
memperhatikanku.*

Adik-adiku tersayang tempat aku berbagi.

Keluarga besar ayah dan ibuku yang selalu mensupportku

*Sesorang yang selalu memberi harapan untuk hidup bersama dimasa yang akan
datang. Dan*

Almamaterku tercinta : Kampus Putih UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلّ وسلّم على محمد و على آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul PEMIKIRAN HASAN MUHAMMAD TIRO TENTANG NEGARA ini. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Dengan penuh kerendahan hati, penyusun menyadari skripsi ini tidak mungkin bisa tersusun bila tanpa petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT, serta bantuan dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung skripsi ini bisa terselesaikan. Untuk itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah bersusah payah membantu dan mendukung terselesainya penyusunan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada:

Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bpk. Drs. Makhrus Munajat, M. Hum., dan Bpk. Ocktoberinsyah, S.Ag., M. Ag., selaku Ketua dan Wakil Ketua Jurusan Jinayah Siyasah, yang telah memberi kemudahan-kemudahan administratif dalam proses penyusunan skripsi ini. Kemudian penyusun juga mengucapkan banyak terimakasih kepada Bpk. H. M. Nur, S. Ag.,

M. Ag., selaku Penasehat Akademik (PA) sekaligus Pembimbing I, yang telah mencurahkan perhatian dan arahnya yang sangat berharga. Juga Bpk.H. Wawan Gunawan, S. Ag., M. Ag., selaku pembimbing II, yang telah banyak memberi masukan serta bantuannya dalam penyelesaian dan penyempurnaan skripsi ini. Kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun mengucapkan banyak terimakasih atas ilmu, wawasan dan pengalaman yang telah diberikan. Selain itu, terimakasih juga kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penyediaan fasilitas dalam proses akumulasi data diantaranya Perpustakaan (UPT) UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Fakultas Syari'ah, Perpustakaan ST. Ignatius, Perpustakaan Daerah Yogyakarta. Dan kepada semua guru yang telah mengajarku huruf A-I-U-E-O, juga yang telah membekali segudang ilmu dan pemahaman keagamaan.

Ungkapan hormat ta'zhim penyusun haturkan kepada Ayah dan Ibunda (Bpk. Ijo Kartijo dan Ibu Tiktik Kartika), selaku guru sekaligus pembimbing spiritualku, yang telah begitu banyak mencurahkan perhatian, pengorbanan serta kasih sayangnya. Kepada Kakak-kakaku (a Furkon dan teh Titin, juga a Budi dan teh Ai), selaku pionir yang telah memberikan bantuannya, baik moril maupun materil. Kepada Adik-adikku tercinta (Irfa dan neng Eva) selaku teman dan pendamping hidup yang selalu memotivasi serta selalu menghiasi sepiku, juga keponakan-keponakanku (Annisa, Azki, Lisda dan Mansya), yang selalu menghiburku. Tidak lupa penyusun mengucapkan terimakasih banyak pada neng

Asih, yang selalu setia menunggu dalam kesendiriannya. Juga buat seluruh keluarganya yang selalu melimpahkan perhatian dan kasih sayangnya.

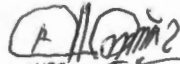
Kepada Seluruh keluarga besar LKMPI, bersamamu penyusun merasa hidup. Seluruh teman-teman JS-2 angkatan 2001, tempat kami berbagi dan berdiskusi. Teman-teman seperjuangan (Wildan S.R., akh Isa N., Didin K., Aan-Martin, Yana S., Imam Ali B., Ni'am, Mumun, Riyan, Toha, Nanang, Yasa, Asep Devi, A Hendra-teh Fitri, Bpk. Irfan Ali Nasrudin, S.H.I. dan yang lainnya), terimakasih atas pertemanan, persahabatan, dan persaudaraan yang telah kalian berikan, juga terimakasih kepada teman-teman KKN angkatan ke-54 (Irfan A.N., Fahrudin, Fauzi, Gondrong(mas Nur-In), Zeny, Upi, Yulia, dan Mbak Nana) yang telah mengajari kita akan arti perbedaan dan kebersamaan.

Serta masih banyak yang lainnya, yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu, untuk itu penyusun juga mengucapkan banyak terimakasih. Semoga pengorbanan mereka semua tercatat di sisi Allah SWT sebagai amal saleh dan mudah-mudahan apa yang telah mereka lakukan di balas oleh-Nya.

Dengan segala kerendahan hati pula, penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan. Akhir kata penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri, dan umumnya bagi para pencinta tulisan.

Yogyakarta, 1 Maret 2007

Penyusun


Ade Rahman Sidik

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	-
ت	Tā'	t	-
ث	sā	s'	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	-
ح	ḥā'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	z'	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	-
ز	zai	z	-
س	sīn	s	-
ش	syīn	sy	-
ص	ṣād	ṣ	ṣ (dengan titik di bawah)

ض	ḍād	ḍ	ḍ (dengan titik di bawah)
ط	ṭāʾ	ṭ	ṭ (dengan titik di bawah)
ظ	ẓāʾ	ẓ	ẓ (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	Fāʾ	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	Hāʾ	h	-
ء	hamzah	,	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila ter-letak di awal kata)
ي	yāʾ	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoflong dan rangkap atau diflong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasroh	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba

يذهب - yazhabu

سئل - su'ila

ذكر - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	Fathah dan alif atau alif Maksurah	ā	a dengan garis di atas

ي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla	قيل - qīla
رمى - ramā	يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

a. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fatḥah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - rauḍah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbana

نَعْمَ - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : الرَّجُل - ar-rajulu

السَّيِّدَة - as-sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَم - al-qalamu

الْجَلال - al-jalālu

الْبَدِيع - al-badī'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un

أمرت - umirtu

النوء - an-nau'u

تأخذون - ta'khuzūna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإن الله هو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau

Wa innallāha lahuwa khairur- rāziqīn

فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufū al-kaila wa al-mīzāna atau

Fa 'aufūl – kaila wal – mīzāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama

diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl
إنَّ أوَّلَ بيت وضع للناس - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qorīb
لله الأمر جميعاً - lillāhi al-amaru jamī'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara besar yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dengan tingkat keberagaman suku, budaya serta agama yang terbesar di dunia. Menyadari sangat luasnya wilayah nusantara ini, kompleksitas dan keberagaman suku bangsa, maka tuntutan akan sebuah bentuk negara dan sistem pemerintahan yang cocok untuk kondisi bangsa yang seperti itu, sangat diperlukan, karena akan sangat menentukan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Realitas konflik sosial yang bergejolak di berbagai wilayah di tanah air terasa sangat menyedihkan. Kenyataan ini menyadarkan siapapun bahwa semangat persatuan, persaudaraan, dan kebangsaan yang selama ini telah dirajut, ternyata sangat rapuh. Semua itu mengindikasikan krisis kebangsaan sudah begitu dalam. Atas dasar realita seperti itu, berarti konsep negara kesatuan telah mengalami distorsi, yang cenderung ditafsirkan identik dengan sentralisasi kekuasaan, bahkan belakangan justru diberi warna uniformitas struktur pemerintahan. Konsekuensinya adalah lahir berbagai masalah dalam hubungan antara pusat dan daerah.

Sehubungan dengan ini, Hasan Muhammad Tiro berpendapat dengan cukup meyakinkan, bahwa negara yang cocok untuk bangsa Indonesia adalah negara federasi. Pendapat itu didasarkan pada kenyataan bangsa Indonesia yang memiliki khasanah kebudayaan yang bermacam-macam serta agama, ras, dan suku bangsa yang berbeda-beda, juga letak wilayah yang berjauhan, yang tidak mungkin bisa bertahan lama dalam satu wadah negara kesatuan yang cenderung menyeragamkan perbedaan. Pemaparan di atas, mengundang penelitian tentang bagaimana pemikiran Hasan Tiro tentang bentuk negara.

Pendekatan yang dipakai dalam menjawab persoalan tersebut di atas adalah metode sosio-historis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar sosio-kultur dan sosio-politik Hasan Muhammad Tiro selama berinteraksi dengan lingkungannya. Disamping itu, metode induktif juga dipakai dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini adalah bentuk negara bagi Indonesia menurut pemikiran Hasan Muhammad Tiro adalah negara federasi atau negara monarki. Tujuan pembentukan negara federasi adalah agar (khususnya) Aceh bisa menjalankan roda pemerintahannya sendiri tanpa didikte oleh pusat dan tidak pula memisahkan diri dari negara Indonesia. Sementara negara monarki hanyalah bentuk negara yang sifatnya alternatif saja, bukan merupakan tujuan utama dari perjuangannya selama ini, atau dengan lain kata dengan catatan kalaulah rakyat Aceh menyetujui perubahan sistem atau tradisi mengenai garis keturunan yang berhak menjadi raja, dari sistem patrilineal ke sistem matrilineal.

Sementara penyusun menyimpulkan bahwa Hasan Muhammad Tiro berkeinginan membentuk sebuah negara federasi dengan sistem demokrasi murni, yang didasarkan pada hak-hak rakyat, serta letak geografis wilayah-wilayah Indonesia yang berjauhan dan keadaan rakyat yang beragam dalam segala hal.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS PEMBIMBING I.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING II	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II NEGARA DAN KARAKTERISTIK PEMIKIRAN ISLAM..	25
A. Tinjauan Umum Tentang Negara	25
1. Asal-mula Negara.....	25
2. Pengertian Negara	29

3. Syarat-syarat Negara	35
4. Bentuk Negara.....	36
a. Negara Federasi	43
b. Negara Monarki.....	45
5. Fungsi dan Tujuan Negara	48
B. Karakter Pemikiran Islam Tentang Negara.....	51
1. Sejarah Singkat Lahirnya Pemikiran Islam Tentang Negara	51
2. Pemikiran Islam Tentang Negara.....	57
a. Pemikiran Islam Konservatif.....	57
b. Pemikiran Islam Liberal.....	61
BAB III HASAN MUHAMMAD TIRO DAN PEMIKIRANNYA	
TENTANG NEGARA.....	67
A. Asal-Usul Hasan Muhammad Tiro	67
B. Kondisi Sosial-Politik Indonesia Masa Hasan Tiro (1945-1956) ...	69
C. Pemikiran Hasan Muhammad Tiro Tentang Negara.....	73
1. Negara Monarki.....	76
2. Negara Federasi.....	80
a. Pembagian Daerah Kekuasaan dalam Negara Federasi	86
b. Partai politik dan Majelis Permusyawaratan dalam Negara Federasi.....	90
BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN HASAN	
MUHAMMAD TIRO	94
A. Analisis Terhadap Negara Monarki	94

B. Analisis Terhadap Negara Federasi.....	98
BAB V PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran-Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	117
Lampiran-Lampiran	I
Curriculum Vitae.....	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diantara persoalan yang selalu hangat dan banyak mendapatkan perhatian dikalangan umat manusia adalah isu politik. Masalah ini bukan hanya sebagai pembicaraan kaum negarawan yang setiap harinya selalu berkiprah dengan berbagai problem yang dihadapi bangsa dan negara, tetapi juga merupakan perbincangan yang selalu hangat disetiap sudut perkampungan dimuka bumi ini. Hal ini dikarenakan masalah politik adalah masalah yang sangat sensitif dan selalu menarik untuk di perbincangkan.

Diskursus mengenai politik, dalam hal ini mengenai negara termasuk di dalamnya mengenai pengertian-pengertian negara yang selalu berubah-ubah itu tidak akan pernah selesai. Hal ini disebabkan karena pengertian-pengertian itu lahir menurut panggilan zamannya, dan karena alam pikiran penciptanya yang bermacam-macam, dan atas alasan itu pulalah pengertian mengenai negara bisa dilihat dari berbagai sudut, seperti sudut agama, aliran atau paham, sosial, pendidikan, yang kesemuanya itu sangat mempengaruhi lingkungan penciptanya.¹

¹ Moh. Kusnardi, dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara, cet. Ke-3*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1994), hlm. 47.

Sehingga tidak heran jika pengertian negara itu menjadi bermacam-macam pula. Misalnya negara monarki, federasi, republik dan yang lainnya.²

Pertumbuhan negara-negara maupun aneka ragam sifat yang ditunjukkan oleh contoh-contoh yang sekarang ada akan memungkinkan beberapa penafsiran yang berlainan cara ketika dihadapkan pada kondisi riil disuatu wilayah atau negara.³ Memang lebih mudah memahami suatu negara yang tertentu daripada sifat negara pada umumnya, sehingga semua orang dapat dan boleh membicarakan "negara". Akan tetapi untuk menghindari pemahan yang kabur, perlu kiranya mendefinisikannya dalam batas-batas apa yang sama bagi semua negara. Mungkin dengan memberi tekanan pada apa yang lebih nampak dalam proses pertumbuhan sejarah.⁴

Penerapan sistem, bentuk maupun dasar negara Indonesia yang terlahir melalui proses pertumbuhan sejarah yang dinilai oleh sebagian orang masih sangat dilematis, hal ini karena terkait dengan berbagai macam ideologi yang mewarnai perjalanan sejarah peradaban masyarakat pada waktu itu, yang masing-masing ingin menjadikan ideoliginya sebagai landasan dalam menentukan bentuk negara pasca kemerdekaan. Sehingga Sukarno dan para elit politik serta tokoh-

² Inu Kencana Syafie. *Ilmu Politik*, cet. Ke-1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 138 – 139.

³ Misalnya Ibnu Abi Rabi' memilih monarki atau kerajaan sebagai bentuk negara di bawah pimpinan seorang raja serta penguasa tunggal. Hal itu didasarkan pengaruh keyakinan agama dan loyaltas kepada dinasti Abbasyiah. Sementara Muhammad Rasyid Ridha (murid Muhammad Abduh) tampil dengan vokal untuk menghidupkan kembali khilafah yang memelihara kekuasaan absolute, yang dihapuskan oleh Mustafa Kemal Attaturk.

⁴ R. M. Mac Iver, *Negara Modern*, alih bahasa Moertono, (Jakarta: Aksara Baru, 1982), hlm. 12.

tokoh pergerakan nasional lainnya mencoba mengakomodir semua ideologi yang ada untuk menyatukan visi dalam menentukan bentuk negara Indonesia yaitu konsep negara *kesatuan* dengan sistem *persidentil* dan dasar negaranya *pancasila*.⁵ Walaupun demikian ada beberapa tokoh yang kurang menyetujui keputusan (bentuk negara kesatuan dan ideologinya) tersebut di atas, diantaranya adalah Hasan Muhammad Tiro (yang selanjutnya penyusun akan menyebutnya Hasan Tiro).

Pemikiran Hasan Tiro yang tidak setuju dengan kenyataan tersebut dilatarbelakangi oleh *sosio-kultur* yang bercorak pergerakan dan perlawanan (perjuangan), serta berbagai macam peristiwa atau gejolak di masyarakat turut membentuk karakter dan pola pikirnya, baik saat berjuang melawan sisa-sisa kolonialisme secara fisik maupun berjuang dalam mempertahankan ideologi atau pendapat yang kadang sering bersebrangan dengan pemikiran-pemikiran yang ada disekitarnya. Di samping itu, keberadaan pemerintah pasca kemerdekaan dirasakan oleh Hasan Tiro tidak mampu menjalankan amanat rakyat dan belum mampu mewujudkan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat yang tersebar di berbagai pelosok wilayah Nusantara. Bahkan beliau juga mengkritisi bahwa rezim yang berkuasa pada saat itu berusaha mengeksploitasi hasil kekayaan daerah. Selain itu, beliau juga menganggap bahwa penguasa pada waktu itu telah memanipulasi dan menapikan keberadaan elemen-elemen masyarakat yang sangat esensial yaitu keberadaan suku bangsa yang berbeda-beda, yang telah menjadi

⁵ Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*, (Jakarta: Grafiti Press, 1987), hlm. 39-41.

soko atau penyangga terhadap eksisnya negara Indonesia.⁶ Kenyataan yang demikian itu dirasakan telah membelenggu hak dan kebebasan sebagai rakyat yang berdaulat.

Kebebasan (kedaulatan rakyat), sama halnya dengan keseluruhan ide tentang demokrasi yang dilaksanakan melalui deretan "coba dan salah" (*trial and error*), yang bagaimanapun memang tidak mungkin dihindari. Yang tersisa dalam proses "pengalaman" atau *eksperimentasi* itu ialah usaha mencegah jangan sampai suatu kesalahan pelaksanaan tumbuh membesar tidak terkontrol begitu rupa sehingga menghancurkan perolehan yang sudah ada, sebab bagaimanapun harus disadari bahwa "kebebasan" sekali lagi adalah suasana kehidupan sosial-politik yang paling kuat mendorong kreatifitas dan kemampuan ambil inisiatif dalam masyarakat pada umumnya, sehingga juga merupakan prasarana tumbuhnya produktifitas yang tinggi disegala bidang.⁷

Persoalan-persoalan disekitar tema ini mengundang banyak peminat untuk menuliskan pemikirannya, diantaranya adalah Hasan Tiro. Dalam bukunya yang berjudul *Demokrasi Untuk Indonesia*, Hasan Tiro mendeskripsikan ketidakpuasannya terhadap bentuk negara yang di anut selama ini dengan menyebutnya telah merampas hak-hak rakyat, kemudian beliauapun mengusung ide mengenai bentuk negara yang cocok untuk iklim Indonesia, yang masyarakatnya heterogen,

⁶ *Ibid.*, hlm. 116-118.

⁷ Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 137.

yaitu negara federasi (Hasan Tiro menyebutnya dengan istilah negara persatuan).⁸ Tujuan pembentukan negara federasi bukanlah untuk menjadikan Indonesia sebagai ladang eksploitasi dan jajahan sebagaimana yang dilakukan oleh kolonialisme,⁹ akan tetapi lebih didasarkan pada keinginan untuk mewujudkan cita-cita perjuangan para pendahulunya yaitu mewujudkan rasa keadilan, kesejahteraan serta kebebasan dalam menjalankan aktivitas kehidupan sesuai dengan aturan, tradisi serta keyakinan yang telah lama ada dan menjadi dasar atau pegangan di masyarakat, serta keinginannya mengangkat eksistensi suku yang telah lama ada, sebagai elemen bangsa yang harus dijadikan sebagai suatu pertimbangan dalam menjalankan roda pemerintahan atau kenegaraan khususnya dalam hal pembagian wilayah dan kekuasaan.¹⁰

Akan tetapi dalam literatur lain dijelaskan bahwa Hasan Tiro mempunyai pemikiran lain mengenai bentuk negara dan bahkan beliau bercita-cita untuk mendirikan negara tersebut, negara yang dimaksud adalah negara Monarki sebagaimana telah diteliti dan diuraikan oleh Ali Khumaini, S.H.I. dalam skripsinya yang berjudul, “Konsep Negara Monarki Hasan Tiro : Tinjauan Fiqh Siyasah”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa beliau bercita-cita mendirikan negara monarki dengan menisbatkan dirinya pada keturunan leluhurnya sebagai keturunan raja Aceh, dengan demikian beliau berhak memperoleh gelar raja

⁸ Hasan Muhammad Tiro, *Demokrasi Untuk Indonesia*, (Jakarta: Teplok Press, 1999), hlm. 101.

⁹ Juniarto, *Sejarah Ketatanegaran Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 70.

¹⁰ Hasan Muhammad Tiro, *Demokrasi*, hlm. 111-112.

sekaligus menjadi pemegang kekuasaan tertinggi atas rakyat Aceh. Dalam skripsi itu juga dijelaskan bahwa bentuk negara yang paling baik menurut Hasan Tiro adalah negara monarki. Disamping itu disinggung juga perjuangan Hasan Tiro bersama Geraka Aceh Merdeka (GAM), sebagai alat untuk mewujudkan cita-citanya tersebut.¹¹

Dari uraian singkat di atas dapat dilihat bahwa Hasan Tiro seolah-olah tidak konsisten dengan cita-cita atau pemikirannya mengenai bentuk negara yang selama ini diperjuangkannya. Munculnya ide tentang negara monarki dan negara federasi yang di usung oleh Hasan Tiro tentunya memiliki latar belakang yang berbeda serta dalam waktu yang berlaianan, dan hal itu tentu sah-sah saja selama masih dalam dataran wacana. akan tetapi yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut adalah bahwa Hasan Tiro merupakan seorang tokoh yang karismatik dan memiliki pengaruh besar di daerahnya (Aceh), sementara daerah tersebut berada dibawah kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sah, yang tentunya sedikit banyaknya akan berpengaruh terhadap keberlangsungan serta ketentraman berbangsa dan bernegara, dan bisa juga akan di jadikan cerminan oleh daerah-daerah lainnya yang memiliki nasib yang sama seperti Aceh.

Cita-cita ingin mendirikan sebuah negara Monarki sebagaimana dijelaskan oleh Ali Khumaeni, dikarnakan beliau merasa memiliki hak untuk meneruskan tongkat estapet kerajaan karena beliau merupakan turunan seorang raja. Sementara ide tentang negara federasi terlahir sebagai respon terhadap rezim yang

¹¹ Lebih jelas lihat Skripsi Ali Khumaeni, "Konsep Negara Monarki Hasan Tiro : Tinjauan Fiqh Siyasah". Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

berkuasa pada waktu itu, yang dianggap otoriter dan kurang peduli terhadap kehidupan rakyat yang ada diberbagai pelosok nusantara, sebagaimana dijelaskan dalam bukunya berjudul *Demokrasi Untuk Indonesia* yang pernah beliau tulis di Amerika Serikat. Disatu sisi Hasan Tiro tidak simpati bahkan hendak mengkikis habis tindakan-tindakan penguasa atau pemerintahan yang otoriter dan kediktatoran, namun di sisi lain, Hasan Tiro juga hendak mendirikan sebuah negara Monarki yang tentunya sarat dengan diktatoris dan ketidak-adilan. Kedua cita-cita tersebut cukup jelas sangatlah bertentangan, karena dasar dari pembentukannya pun tidaklah sama.

Oleh karena itu, penyusun merasa perlu meneliti lebih lanjut mengenai pemikiran Hasan Tiro tentang negara, yang sesungguhnya diinginkan oleh beliau itu bentuk negara yang mana. Apakah negara federasi, atautkah negara monarki?. Sekalipun kedua cita-cita mengenai bentuk negara tersebut bisa dan mungkin saja direalisasikan, akan tetapi kecil kemungkinan bisa diimplementasikan oleh orang yang sama dan dalam waktu yang bersamaan pula, tanpa mempertimbangkan segala hal yang ada disekitarnya.

Sehubungan dengan pembahasan mengenai kedua bentuk negara tersebut, penyusun akan membatasinya dengan memfokuskannya pada pembahasan bentuk negara federasi, sementara mengenai bentuk negara monarki hanya akan dibahas seperlunya (poin-poin yang dianggap penting) saja. Karena mengenai bentuk negara monarki, sudah dibahas dengan cukup panjang-lebar oleh saudara Ali Khumaini dalam skripsinya yang berjudul, “Konsep Negara Monarki Hasan Tiro

: Tinjauan Fiqh Siyasah”, sehingga penyusun merasa tidak perlu lagi menguraikan secara rinci.

B. Pokok Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan adalah :

1. Bagaimanakah pemikiran Hasan Tiro tentang bentuk negara ?
2. Bagaimanakah pandangan *fiqh siyasah* terhadap pemikiran tersebut ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penulisan penelitian ini bertujuan *pertama*, mengungkap dan menjernihkan pemikiran Hasan Tiro tentang bentuk negara yang selama ini masih ngambang atau belum begitu jelas dan tegas. *Kedua*, mengungkap serta mendeskripsikan pemikiran Hasan Tiro tentang bentuk negara yang selama ini masih jarang tersentuh karena mungkin terpendam oleh sejarah atau mungkin karena adanya stereotip masyarakat, baik masyarakat umum maupun masyarakat akademik terhadap beliau, yang mungkin dikarenakan hanya melihat sebagian pemikiran dan kehidupannya, terutama hanya melihat dari segi aksi perlawanan yang dilakukannya terhadap pemerintah. Oleh karena itu dengan penyusunan penelitian ini diharapkan dapat melihat secara utuh siapa Hasan Tiro itu dan bagaimana pemikiran mengenai bentuk negara yang sesungguhnya. *Ketiga*, penelitian ini juga dimaksudkan untuk menganalisa relevansi pemikiran Hasan Tiro tersebut ketika harus diimplementasikan di Indonesia pada masa sekarang.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah *pertama*, memperkaya khasanah intelektual bangsa Indonesia khususnya dalam bidang politik dan ketatanegaraan, serta dapat mengungkap dan membangun kembali pemikiran politik Indonesia khususnya mengenai bentuk negara yang lebih *egaliter* bagi seluruh rakyat Indonesia. *Kedua*, dapat dijadikan bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang studi pemikiran politik di Indonesia khususnya dan di seluruh penjuru dunia pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Kajian-kajian tentang pemikiran Hasan Tiro terutama mengenai bentuk negara dirasa masih minim, dan sejauh ini penyusun belum menemukan kajian-kajian yang komprehensif mengenai pemikiran Hasan Tiro mengenai bentuk negara tersebut, dan untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki sesuai dengan topik permasalahan, penyusun tidak melepaskan diri dari hasil penelitian para peneliti terdahulu sebagai pendukungnya. Berikut ini akan dikemukakan beberapa karya para peneliti :

M. Isa Sulaiman dalam karyanya berjudul *Aceh Merdeka : Ideologi, Kepemimpinan dan Gerakan*.¹² Lebih memfokuskan pada solusi penyelesaian konflik untuk Aceh pada saat pemerintahan Orde-Baru dan kemungkinan-kemungkinan yang timbul dari Gerakan Aceh Merdeka, walaupun ada sedikit pembahasan tentang kenegaraan yang terkonsep oleh Hasan Tiro akan tetapi tidak

¹² Isa Sulaiman, *Aceh Merdeka : Ideologi, Kepemimpinan dan Gerakan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000).

menjelaskan harus bentuk negara yang seperti apa yang dicita-citakan oleh Hasan Tiro.

Buku karangan Al-Chaidar yang berjudul *Gerakan Aceh Merdeka : Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*.¹³ Buku ini membahas tentang cita-cita Hasan Tiro untuk membentuk Aceh sebagai negara monarki, dan pembahasan buku itu lebih memfokuskan pada perkembangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sejak tahun 1976 hingga sekarang (sebelum perjanjian damai antara GAM dengan Pemerintah Indonesia ditanda-tangani/disepakati) beserta tokoh-tokohnya.

Cornelis Van Dijk dalam bukunya *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*, mengulas keterlibatan Hasan Tiro dalam gerakan melawan kolonialisme serta keterlibatannya dalam gerakan Darul Islam/DI-TII. Dalam buku itu juga dijelaskan mengenai ketegangan antara Hasan Tiro dengan Perdana Menteri Ali Sastroamidjaja, yang berakhir dengan pencabutan kewarganegaraan Hasan Tiro dari Indonesia.¹⁴

Solidin dalam skripsinya, "Pergolakan Islam Politik di Indonesia : Studi Atas Gerakan Aceh Merdeka : Tinjauan Fiqh Siyasah", lebih menjelaskan usaha Hasan Tiro dan para tokoh-tokoh Aceh yang lainnya dalam menegakkan syari'at Islam di Aceh.¹⁵

¹³ Al -Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka : Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*, cet. Ke-1, (Jakarta: Madani Press, 1999).

¹⁴ Cornelis Van Dijk, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*, judul asli : *Under the Banner of Islam (the Darul Islam in Indonesia)*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1995).

¹⁵ Solidin, "Pergolakan Islam Politik di Indonesia : Studi Atas Gerakan Aceh Merdeka : Tinjauan Fiqh Siyasah". Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

Skripsinya Riswandi, "Pergolakan Sipil di Aceh Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Gerakan Teungku Muhammad Daud Beureuh dan Hasan Muhammad Tiro)", membahas tentang pergolakan sipil di Aceh, yang dimotori oleh gerakan politik Daud Beureuh dan gerakan politik Hasan Tiro. Yaitu pergolakan dalam bidang Hukum Pidana Islam, serta pengaruh pergerakan tersebut terhadap kepentingan jangka pendek untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar. Upaya penyelesaian yang menyangkut pergolakan di Aceh melalui pemberlakuan Hukum Pidana Islam merupakan implementasi budaya yang berkembang dan integrasi sosial untuk tetap eksis dalam interaksi sosial secara membumi.¹⁶

Sementara dalam skripsi, "Konsep Negara Monarki Hasan Tiro : Tinjauan Fiqh Siyasah", yang disusun oleh Ali Khumaeni menjelaskan pemikiran Hasan Tiro mengenai konsep negara monarki dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Aceh. dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa beliau bercita-cita mendirikan negara monarki dengan menisbatkan dirinya pada keturunan leluhurnya sebagai keturunan raja Aceh, dengan demikian beliau berhak memperoleh gelar raja sekaligus menjadi pemegang kekuasaan tertinggi atas rakyat Aceh. Dijelaskan pula bahwa bentuk negara yang paling baik menurut Hasan Tiro adalah negara Monarki. Disamping

¹⁶ Riswandi, "Pergolakan Sipil di Aceh Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Gerakan Teungku Muhammad Daud Beureuh dan Hasan Muhammad Tiro)". Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

itu disinggung juga perjuangan Hasan Tiro bersama Geraka Aceh Merdeka (GAM), sebagai alat untuk mewujudkan cita-citanya tersebut.¹⁷

Dari pemaparan tersebut terbaca bahwa masalah yang menjadi fokus kajian skripsi ini belum dibahas oleh penulis sebelumnya.

E. Kerangka Teoretik

Bidang hukum Tata negara adalah bidang hukum yang berkaitan erat dengan bidang politik. Dimana kepentingan-kepentingan politik, pandangan ideologi, serta pendirian-pendirian politik saling berinteraksi satu sama lain.¹⁸ Dengan demikian, karena ini pembahasan tentang negara maka tidak bisa dilepaskan dari aspek politik.

Konsep-konsep mengenai negara dan pemerintahan telah mengalami peninjauan kembali (*review*) setelah usainya Perang Dunia II. Sampai sekarang ini, ada 2 (dua) hal yang mempengaruhi timbulnya perubahan atau penafsiran kembali konsep-konsep ilmu politik pada umumnya dan konsep-konsep mengenai negara dan pemerintahan pada khususnya, yaitu :

1. Munculnya negara-negara baru yang merdeka dan berdaulat dengan sistem politik sendiri-sendiri, baik bentuk negara maupun sistem pemerintahan, termasuk pula mengenai pola peranannya dalam hubungan internasional.

¹⁷ Ali Khumaeni, "Konsep Negara Monarki Hasan Tiro : Tinjauan Fiqh Siyasah". Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

¹⁸ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan Rakyat dan Sistem Kepartaian*, cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. viii.

2. Kesadaran bahwa ada keaneka-ragaman (*pluralisme*) antara masyarakat-masyarakat dan budaya-budaya di dunia ini. Para pakar politik mulai memberi telaah khusus kepada aspek-aspek budaya politik, karena menyadari pentingnya faktor pengaruh masyarakat pada tindakan serta kegiatan politik di dalam suatu negara.

Sementara di kalangan umat Islam sampai sekarang terdapat tiga aliran dalam memandang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. *Aliran pertama*, berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, sebaliknya Islam adalah satu agama yang sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Para penganut aliran ini pada umumnya berpendirian bahwa:

1. Islam adalah suatu agama yang serba lengkap, di dalamnya terdapat pula antara lain sistem ketatanegaraan atau sistem politik. Oleh karenanya, dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan Barat.

2. Sistem ketatanegaraan atau politik Islam yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad S.A.W. dan keempat sahabatnya (*Al- Khulafa al-Rasyidin*).

Aliran kedua, berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini, Nabi Muhammad hanyalah seorang Rasul biasa seperti halnya Rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan

yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur, dan Nabi diutus tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai negara.

Aliran ketiga, menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap, yang di dalam terdapat sistem kenegaraan. Tapi aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan Maha Penciptanya. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.¹⁹

Sejauh ini, untuk meneliti para pemikir politik Islam dalam memandang konsep tentang negara, menurut M. Din Syamsudin terdapat tiga polarisasi.²⁰ *Pertama*, antara *skriptularistik* dan *rasionalistik*. Polarisasi ini berhubungan dengan pendekatan terhadap sumber Islam, al-Qur'an dan al-Hadits, terutama menyangkut metode penafsiran. Kecenderungan *skriptularistik* menampilkan pemahaman yang bersifat tekstual dan literal, yaitu penafsiran yang mengandalkan pengertian bahasa. Sedangkan *rasionalistik* cenderung menampilkan penafsiran rasional dan konstektual. *Kedua*, antara *idealistik* dan *realistik*. Pendekatan pertama cenderung melakukan idealisasi terhadap bentuk negara atau sistem pemerintahan dengan menawarkan nilai-nilai Islam yang ideal. Adapun pendekatan *realistik* menerima format kenegaraan yang telah ada, atau

¹⁹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 1-2.

²⁰ M. Din Syamsudin, "Usaha Pencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam", dalam *Jurnal Ilmu dan Budaya Ulumul Qur'an*, No. 2 Vol. IV tahun 1995 ; juga M. Din Syamsudin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: PT. Logos, 2000), hlm. 66-67.

lebih bersifat kompromistik dengan cara menerima dan mengoreksi kekuasaan lewat pemberian isyarat dan pesan moral. Ada dua kemungkinan implikasi politik dari pemikiran *realistik* yaitu melegitimasi kekuasaan atau mengoreksinya, tetapi lewat isyarat pesan moral. *Ketiga, Formalistik dan substantivistik*. Sesuai dengan arti kedua istilah ini, pendekatan *formalistik* cenderung meningkatkan bentuk daripada isi. Pendekatan ini menampilkan konsep tentang negara dan simbolisme keagamaan, seperti tampak pada model negara Islam atau partai Islam. Pendekatan *substantivistik* justru sebaliknya cenderung menekankan isi dari pada bentuk. Sehubungan dengan para pemikir Islam, secara garis besar dari ketiga polarisasi tersebut di atas penyusun mengelompokkannya menjadi dua kelompok pemikir Islam yaitu konservatif dan liberal.

Istilah konservatif (tradisionalis) dan yang lainnya (revivalis, modernis, liberal), baru muncul di masa kontemporer ini, sebagai usaha pengklasifikasian para aktivis pergerakan dalam Islam untuk merespon masalah-masalah yang ada disekelilingnya. Istilah ini tidak ditemukan di awal perkembangan Islam hingga abad ke 12 M.²¹

Islam konservatif atau meminjam istilahnya Hasbi Amiruddin tradisionalis adalah yang memegang pemikiran ulama abad pertengahan tanpa mengadakan suatu usaha pergantian yang bermakna termasuk dalam merespon masalah-masalah sosial dalam masa kontemporer. Secara umum mereka menganggap

²¹ M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 13. Sementara Harun Nasution mengklasifikasikan pemikiran Islam ditinjau dari aspek sejarah dan budaya itu terbagi pada tiga periode yaitu : *Pertama*, periode klasik : 650 – 1250 M.; *kedua*, periode pertengahan : 1250 – 1800 M.; *ketiga*, periode modern : 1800 M. Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, (Jakarta: UI-Prees, 1985), hlm. 56-88.

bahwa pintu ijtihad telah tertutup, karena itu ajaran Islam harus diikuti melalui madzhab yang telah ada, selain tidak boleh lagi berijtihad karena pintu ijtihad telah tertutup, mereka juga menganggap ulama-ulama sekarang tidak mampu berijtihad lagi karena mereka tidak memiliki kemampuan, kepandaian, serta ilmu yang setingkat ulama-ulama pemimpin madzhab di masa dahulu. Di samping itu, golongan konservatif berpendapat bahwa seluruh persoalan kehidupan manusia yang berhubungan dengan hukum agama telah lengkap diijtihadkan dan ditulis oleh ulama-ulama terdahulu, karena itu tidak ada lagi hal yang perlu diijtihadkan lagi. Kalaupun ada persoalan-persoalan baru yang muncul sekarang dan perlu pemecahan cukup melihat kitab yang ditulis oleh ulama tersebut (kitab kuning), kemudian mengkiaskannya dengan menggunakan *'illat* yang telah dirumuskan oleh mereka.²²

Misalnya, Muhammad Rasyid Ridha (murid Muhammad Abduh) tampil dengan vokal untuk menghidupkan kembali khilafah yang memelihara kekuasaan absolut, yang dihapuskan oleh Mustafa Kemal Attaturk. Untuk itu, Rasyid Ridha sengaja menulis buku yang berjudul *al-Khilafah wa- al- Imamah al- 'Uzma*, dengan tujuan untuk menelaah ulang teori konstitusi khilafah dan berusaha memperbaiki lembaga politik tersebut, dalam rangka rehabilitasi kehidupan umat Islam.²³

²² M. Hasbi Amiruddin, *Konsep*, hlm. 16.

²³ M. Din Syamsuddin, "Antara yang Berkuasa dan yang Dikuasai: Refleksi atas Pemikiran dan Praktek Politik Islam," dalam *Jurnal Al-Jami'ah*, Vol 39, No. 1 Januari – Juni 2001, hlm. 162.

Sementara Ibnu Abi Rabi' memilih monarki atau kerajaan sebagai bentuk pemerintahan di bawah pimpinan seorang raja serta penguasa tunggal, sebagai bentuk yang terbaik. Dia menolak bentuk-bentuk lain seperti aristokrasi, oligarki, demokrasi, lebih-lebih demagogi.²⁴

Pengaruh keyakinan agama dan loyaltas kepada dinasti Abbasyiah juga tampak pada pendapatnya tentang dasar kekuasaan raja. Dia mengatakan, “Allah telah memberikan keistimewaan kepada para raja dengan segala keutamaan, telah memperkokoh kedudukan mereka di bumi-Nya, dan mempercayakan hamba-hamba-Nya kepada mereka. Kemudian Allah mewajibkan para ulama untuk menghormati, mengagungkan dan taat kepada perintah mereka”.²⁵ Dalam hubungan ini dia mengemukakan dua ayat al-Qur'an:

وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليلوكم في ما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.²⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.²⁷

²⁴ Munawir Sjadzali, *Islam*, hlm. 46.

²⁵ Munawir Sjadzali, *Islam*, hlm. 47.

²⁶ Al-An'am (06) : 165.

²⁷ An-Nisaa (04) : 59.

Sementara istilah Islam liberal pertamakali dikemukakan oleh Asaf Ali Asghar Fyzee.²⁸ Inti utama pemikiran Islam liberal, menurut hasil penelitian Leonard Binder, meskipun al-Qur'an itu bahasa wahyu, namun demikian makna dan esensi wahyu bukanlah hal yang bersifat verbal. Sehingga untuk mendapatkan makna wahyu, tidak terbatas pada kata-kata yang terungkap dalam al-Qur'an dan untuk memahaminya melalui usaha yang didasarkan kata-kata, tetapi penafsirannya dapat melampauinya sehingga menemukan arti sebenarnya.²⁹

Perkembangan awal dari wacana Islam liberal tidak dapat dilepaskan dari beberapa agenda penting yang menjadi perhatian utama dalam dunia Islam sejak masa abad ke-18 sampai masa abad ke-20. suatu fenomena sosial politik yang kemudian menjadi sejarah perjuangan bangsa-bangsa muslim. Di mana sejarah perjuangan tersebut menunjuk (minimal) empat agenda.³⁰ *Pertama*, kolonialisme-imperialsme Eropa terhadap dunia Islam. *Kedua*, perjuangan untuk lepas dari penjajahan dan mencapai kemerdekaan dengan membangun proyek “negara bangsa” (*nation state*).³¹ *Ketiga*, hambatan dari dalam tubuh umat Islam berupa; stagnasi pemikiran dan keterbelakangan budaya dan iptek sehingga tidak dapat

²⁸ Charles Kurzman, (ed)., *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, cet. Ke- 1, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. Xiii.

²⁹ Rudhy Suharto, “Islam dan Tantangan Modernitas : Kajian Terhadap Metode Ijtihad Islam Liberal”, *Jurnal al-Huda*, No. 6 Tahun 2002, hlm. 24.

³⁰ Airlangga Pribadi M. dan Yhudie R. Haryono, *Post Islam Liberal : Membangun Dentuman Mentradisikan Eksperimentasi*, (Bekasi: Gugus Press, 2002), hlm.167.

³¹ John L. Esposito, *Ancaman Islam Mitos atau Realitas*, (ter), (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 59.

menikmati bahkan alergi terhadap buah modernitas.³² *Keempat*, perebutan umat oleh *rulling* agama dalam rangka “kehendak untuk berkuasa” (*the will to power*).³³

Terdapat beberapa terminologi yang digunakan untuk menjelaskan apa yang disebut sebagai wacana Islam liberal. Charles Kruzman menjelaskan bahwa Islam liberal merupakan suatu penafsiran progresif terhadap (teks) Islam yang secara otentik berangkat dari khasanah tradisi awal Islam untuk berdialog agar dapat menikmati kemajuan dari modernitas, seperti; kemajuan ekonomi, demokrasi, hak-hak asasi manusia, dan lain-lain. Pandangan ini mempercayai bahwa Islam apabila dipahami secara otentik sejalan dengan – bahkan perintis – liberalisme Barat.³⁴

Leonard Binder memahami terminologi Islam liberal dengan membedakannya dengan terminologi Islam tradisionalis. Islam tradisionalis menjadikan bahasa al-Qur'an sebagai basis dari pengetahuan absolut tentang dunia. Sedangkan bagi Islam Liberal bahasa al-Qur'an berkoordinasi dengan esensi dari wahyu, namun isi dan makna dari wahyu tidaklah esensial bersifat verbal. Mengingat kata-kata dari al-Qur'an tidaklah mencakup seluruh pemahaman makna tentang wahyu Tuhan, sehingga memerlukan upaya untuk

³² Charles Kurzman, (ed)., *Wacana Islam Liberal*, hlm. xii.

³³ Nuswantoro dan Daniel Bell, *Matinya Ideologi*, (Magelang: InonesiaTera, 2001), hlm. 52.

³⁴ Charles Kurzman, (ed)., *Wacana Islam Liberal*, hlm. xxxii-xxxiii.

memahami apa yang menjadi dasar dari bahasa wahyu tersebut melampauinya, mencari apa yang direpresentasikan dan ditampilkan oleh bahasa.³⁵

Menurut Luthfi Assyaukanie, tataran yang sebenarnya bukanlah pada formalisme syari'at oleh negara. Cita-cita sebenarnya dari sistem pemerintahan apa itu Islam atau bukan itu pada hakekatnya adalah mengupayakan adanya keadilan dan kesetaraan. Nabi sendiri tidak pernah mengumumkan pemerintahannya sebagai negara Islam atau pemerintahan Islam, karena apa yang dijalankan Nabi sesungguhnya telah mengandung inti ajaran Islam, yakni keadilan dan kesetaraan.³⁶ Sebagaimana firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ

أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ....³⁷

F. Metode Penelitian

Agar dapat menghasilkan penelitian yang komprehensif dan integral, maka penyusun menggunakan beberapa rangkaian metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, analisis data, pendekatan, dan teknik pengumpulan data.

1. Jenis Penelitian

³⁵ Leonard Binder, *Islam Liberal : Kritik Terhadap Ideologi-ideologi Pembangunan*, alih bahasa, Imam Muttaqin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 4-5.

³⁶ Luthfi Assyaukanie, *Pengantar Wajah Islam Liberal di Indonesia*, (Jakarta: JIL, 2002), hlm 35.

³⁷ An-Nisa (4) : 135.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*),³⁸ yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Diantara buku yang akan dijadikan rujukan adalah: *Demokrasi Untuk Idonesia* (Hasan Muhammad Tiro). *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman* (M. Hasbi Amiruddin). *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Munawir Sjadzali). *Al-Qur'an dan Ilmu Politik* (Inu Kencana Syafi'i). *Dasar-dasar Ilmu Politi* (Miriam Budiardjo). *Ilmu Negara* (Soehino), dan lain sebagainya.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif-inferensial*. Yang di maksud dengan *deskriptif* adalah meneliti gambaran tentang sifat-sifat atau karakteristik suatu peristiwa. Sifat-sifat yang dikaji adalah sifat-sifat beserta peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar tokoh tersebut yang mempengaruhi pemikirannya. Sedangkan yang dimaksud dengan *inperensial* adalah beberapa hipotesa untuk maksud menerima atau memperkuat. Artinya, penelitian ini menelaah konsep negara yang telah ada, selanjutnya dari konsep tesebut dihadapkan pada tokoh yang diteliti.³⁹

Penelitian ini menggambarkan bagaimana corak pemikiran Hasan Tiro dalam masalah kenegaraan, serta sejauh mana pengaruh pemikirannya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

³⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research untuk Pemulisan Paper, Skripsi, Thesis, dan Desertasi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

³⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1989), hlm. 139-140; dan Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum, cet. Ke-2*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 15; lihat juga Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

3. Sumber Data

Sumber data yang menjadi acuan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu, data primer berupa buku karya Hasan Tiro yang berjudul *Demokrasi Untuk Indonesia*, sementara data sekundernya penyusun ambil dari berbagai sumber yang mendukung terhadap penyusunan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sedangkan dalam pengumpulan data, apabila pada umumnya ilmu-ilmu sosial mempelajari manusia secara langsung dengan observasi, namun karena kajian ini dengan pendekatan sejarah maka data yang akan dikumpulkan adalah berupa dokumen yang relevan dengan objek penelitian.⁴⁰ Dokumen tersebut berupa data-data yang diambil dari buku yang ditulis oleh Hasan Tiro dan berbagai sumber lain yang tentunya ada kaitannya dengan penelitian ini.

5. Analisa Data

Data yang telah didapatkan akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deduktif dan interpretatif. Deduktif merupakan langkah analisis data dengan cara menerangkan beberapa data yang bersifat umum mengenai pemikiran Hasan Tiro tentang negara, kemudian diambil kesimpulan yang menyeluruh. Sedangkan Interpretatif artinya menafsirkan atau membuat tafsiran terhadap pemikiran Hasan Tiro tentang negara, tetapi yang tidak bersifat

⁴⁰ Sartono Kartodirdjo, "Metode Penggunaan Bahan Dokumen", dalam Koentjaraningrat (red), *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet. Ke-2 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 62.

subjektif melainkan bertumpu pada evidensi obyektif untuk mencapai kebenaran yang obyektif.⁴¹

6. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-historis,⁴² yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar sosio-kultur dan sosio-politik Hasan Tiro selama berinteraksi dengan lingkungannya. Dan metode sosio-historis ini juga dimaksudkan sebagai suatu metode pemahaman terhadap suatu kepercayaan, agama atau kejadian dengan melihatnya sebagai suatu kenyataan yang mempunyai kesatuan dengan waktu, kebudayaan, golongan dan lingkungan dimana kepercayaan, ajaran dan kejadian itu muncul.⁴³ Disamping itu, pendekatan empiris-induktif mewarnai penelitian ini,⁴⁴ dengan pendekatan ini akan lebih mempermudah dalam menelusuri pemikiran Hasan Tiro yang cenderung tidak konsisten dalam masalah bentuk negara tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini, dan agar lebih terarah, maka penyusun membuat sistematika sebagai berikut:

⁴¹ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 43.

⁴² Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Pres, 1998), hlm. 105.

⁴³ Mukti Ali, "Penelitian Agama (Suatu Pembahasan Metode dan Sistem)", dalam al-Jami'ah, No. 31-33 Tahun 1984, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 21-36.

⁴⁴ Pendekatan empiris-induktif lebih bernuansa Hegelian Logis yang bercirikan "every one of them was [and is] right within its own field." Artinya kebenaran itu bersifat relatif dan dipengaruhi oleh asumsi-asumsi dasar yang dianut dan juga dealektika sosial yang terjadi. Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi penelitian Filsafat*, cet. Ke-3 (Yogyakarta: Kanisius, 1994). hlm. 51.

Bab pertama pendahuluan, yang berisi tentang pertanggungjawaban metodologis penyusun dalam penyusunan skripsi ini, yang meliputi sub-sub bab antara lain: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab ke dua membahas mengenai tinjauan umum negara meliputi asal mula negara, pengertian negara, syarat-syarat negara, bentuk negara (meliputi negara federasi dan negara monarki), tujuan dan fungsi negara. Serta akan dibahas pula mengenai karakteristik pemikiran Islam tentang negara yang meliputi sejarah singkat lahirnya pemikiran Islam tentang negara serta pemikiran Islam konservatif dan Islam liberal tentang negara.

Bab ke tiga membahas seputar asal-usul Hasan Tiro, kondisi sosial-politik Indonesia masa Hasan Tiro (1945-1956), serta pemikiran Hasan Tiro tentang negara monarki dan federasi, pembagian daerah kekuasaan, juga partai politik dan majlis permusyawaratan dalam negara federasi. Di awal dalam bab ini akan sedikit disinggung pula masalah demokrasi, hal itu dilakukan karena menurut pemahaman penyusun bahwa pembahasan mengenai negara ini sangat berkaitan erat dengan masalah demokrasi. Atau dengan lain kata demokrasi ini sebagai pelantara atau penghubung untuk sampai pada tujuan penelitian tentang bentuk negara yang penyusun teliti.

Bab ke empat membahas analisis terhadap pemikiran Hasan Tiro tentang negara monarki dan negara federasi.

Bab ke lima, berisi penutup yang berupa kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini adalah:

1. menunjukkan bahwa Hasan Tiro memiliki pemikiran merubah bentuk negara Indonesia dari negara kesatuan ke bentuk negara federasi (persatuan), namun sebelum sampai pada akhir pemikirannya tersebut, Hasan Tiro sempat melontarkan ide pembentukan negara monarki. Penyusun berpandangan bahwa pemikiran negara monarki tersebut hanya sekedar salah satu alternatif, dan bukan tujuan utama “perjuangan”nya selama ini. Sekalipun wilayah yang hendak di jadikan negara bagian tersebut hanya satu yaitu Aceh, dan warisan kebudayaan Islam di sana masih sangat kental dalam kehidupan sehari-hari, juga kebetulan beliau merupakan salah satu keturunan kerajaan Aceh. Akan tetapi menurut hemat penyusun, bentuk negara yang lebih terformat dalam pikiran beliau lebih condong pada bentuk negara federasi. Karena, disamping akan lebih sulitnya merubah sistem kerajaan Aceh mengenai garis keturunan yang berhak memegang tahta kerajaan, dunia internasional yang akan menjadi salah satu unsur legalisasi berdirinya suatu negarapun masih sangat alergi terhadap label-label Islam, sehingga diawatirkan dukungan untuk membentuk negara yang mandiri tidak akan terrealisasikan. Sementara pemikiran mengenai bentuk negara federasi didasarkan pada kenyataan bangsa Indonesia yang memiliki khasanah kebudayaan yang bermacam-macam serta agama, ras, dan suku bangsa yang berbeda-beda,

juga letak wilayah yang berjauhan, yang tidak mungkin bisa bertahan lama dalam satu wadah negara kesatuan yang cenderung menyeragamkan perbedaan.

Terlepas dari sisi positif dan negatifnya negara federasi juga negara monarki, sepintas pemikiran Hasan Tiro mengenai kedua bentuk negara tersebut sepertinya saling keterkaitan. Atau secara sederhana bisa dikatakan bahwa Hasan Tiro bisa saja menghendaki negara kesatuan Republik Indonesia ini dirubah menjadi negara federasi, dan salah satu bentuk dari negara federasi itu adalah negara monarki. Akan tetapi perlu ditelaah lebih lanjut bahwa yang namanya negara monarki, khususnya dalam penetapan kebijak publik sarat (penuh) akan campur tangan dari penguasa tunggal (raja) dan biasanya sangat dominan, hal itu tentunya jauh dari keadilan yang diinginkan oleh rakyat banyak (belajar dari pengalaman sejarah masa lalu). Sementara kalau berpedoman pada negara federasi bukan lagi raja (penguasa) yang mendominasi kekuasaan, akan tetapi sepenuhnya bertumpu pada kehendak rakyat secara menyeluruh, karena yang menjadi pedoman negara federasi adalah nilai-nilai demokrasi (kedaulatan rakyat).

2. Sementara pemikiran Hasan Tiro mengenai bentuk negara apabila ditelaah melalui sudut pandang *fiqih siyasah* (politik Islam), maka kesimpulan yang dapat diambil tidak akan jauh berbeda dengan uraian di atas. Karena, realitas sejarah menunjukkan bahwa negara itu dibutuhkan dalam rangka pengembangan dakwah, hal ini dapat dilihat misalnya waktu nabi mulai menyiarkan agama Islam di Mekkah, beliau belum dapat membentuk suatu masyarakat yang kuat lagi berdaulat. Umat Islam pada waktu itu masih lemah, tidak sanggup menentang

kaum Qurais, dan belum bisa berbuat banyak dengan misi dakwahnya, yang akhirnya memaksa nabi dan para sahabatnya harus hijrah ke Yatsrib (Madinah). Di Madinah nabi dan umat Islam mengalami perubahan besar, bahkan nabi sendiri menjadi pemimpin dalam segala hal termasuk dalam urusan-urusan diplomasi kekuasaan. Lingkungan atau wilayah kerja umat Islam tersebut yang selanjutnya diidentikkan dengan sebuah negara.

Sekalipun demikian, menurut Fazlur Rahman sebagaimana yang dikutip oleh Hasbi Amiruddin, Islam tidak memerintahkan dan juga tidak mengajarkan secara jelas mengenai bentuk dan sistem kenegaraan, tetapi beliau memahami bahwa dalam al-Qur'an terdapat sejumlah tata nilai dan etika kenegaraan.¹

Sejalan dengan pemikiran di atas, Ibnu Taimiyyah dengan tegas dan keras, mengatakan bahwa negara Islam atau kekhilafahan tidak memiliki dasar konstitusional dari al-Qur'an, karena menurutnya walaupun al-Qur'an menjelaskan kebutuhan manusia terhadap pemerintahan dan kekuasaan, tetapi al-Qur'an tidak memaparkan secara rinci keputusan konstitusional pemerintahan Islam. Teori kekhilafahan tidak ada dasar pijakan dalam al-Qur'an maupun sunnah. Alasannya bahwa dalam teori Islam yang ada bukan khilafah tetapi hukum syari'at. Meskipun khilafah dikatakan berpijak pada syari'at, namun perkembangan sejarah lembaga tersebut sebagai satu-satunya organisasi politik yang diterima justru mengantarkan pada legitimasi tertentu dengan berbagai maksud yang tidak selalu segaris dengan ajaran-ajaran pokok syari'at, kebutuhan manusia terhadap pemerintahan tidak hanya ditegaskan oleh hukum wahyu, tetapi

¹ M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 80.

juga diperkuat oleh hukum alam atau akal yang melibatkan manusia untuk bergabung dan menjalankan kerjasama. Lebih lanjut Ibnu Taimiyyah memandang bahwa umat Islam di dunia ini tidak perlu meningkatkan diri pada kekuasaan politik negara Islam yang tunggal dikarenakan adanya beberapa kesulitan-kesulitan teoritis dan praktis yang tercakup dalam skema holistik. Dan beliau lebih mendukung formasi beberapa kemerdekaan yang terikat bersama oleh lingkungan, kendati terdiri dari beberapa negara Islam.²

Dalam konteks ini implikasi khilafah (yang di dalamnya terhitung mengenai bentuk negara monarki) sebagai sistem terbaik, menurut penyusun menjadi tidak representatif lagi. Oleh karena itu, apabila pemikiran Hasan Tiro yang lebih condong kearah pembentukan negara federasi dikorelasikan dengan fiqh siyasah, maka ada sinergisitas. Maksudnya adalah didalam fiqh siyasah banyak sekali permasalahan-permasalahan kenegaraan yang mengutamakan permusawaratan serta egaliter, dan hal-hal yang seperti itulah yang sering diperaktekkan dalam negara yang berbentuk federasi.

Jadi kesimpulan akhir penyusun bahwa Hasan Tiro itu menginginkan terbentuknya negara federasi dengan demokrasi murni. Itulah sebabnya beliau selalu berbicara masalah keadilan ditangan rakyat dan mengkritik habis penguasa yang berbuat sewenag-wenang yang tidak pernah melibatkan rakyatnya dalam menentukan kebijakan untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara sebagai landasan ide dan pemikirannya. Sekalipun demikian, pemikiran Hasan

² Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyyah tentang Pemerintahan Islam*, alih bahasa, Masrohin, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 121-122.

Tiro tersebut tetap berpijak pada etika moral politik yang ada dalam al-Qur'an dan as-sunnah, yaitu demokrasi.

Dengan demikian, Hasan Tiro dapat digolongkan pada pemikir Islam liberal, yang memiliki pemikiran pembentukan negara federasi yang didasarkan pada hak-hak dasar kehidupan bagi seluruh rakyat, dengan tujuan memberikan kesempatan dan kebebasan untuk menjalankan segala aktivitas, khususnya masalah-masalah kehidupan bernegara yang tidak begitu rinci diterangkan dalam al-Qur'an.

Apabila melihat kenyataan keberadaan bangsa Indonesia sekarang kemudian dihubungkan dengan ide bentuk negara yang ditawarkan oleh Hasan Tiro, dengan pertimbangan letak geografis antara satu wilayah (pulau) banyak yang berjauhan sehingga kesejahteraan kadang kurang diperhatikan, keamanan kurang terjamin, bahkan sering menimbulkan kecemburuan sosial akibat tidak adilnya dalam pembagian hasil bumi dan sebagainya, maka cukup memberikan angin segar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dimasa yang akan datang.

Jadi sesungguhnya bukan berarti Hasan Tiro tidak konsisten dengan pemikirannya akan tetapi atas dasar kenyataan bangsa Indonesia yang beragam suku-bangsa, budaya dan agama itulah kiranya sudah saatnya bentuk negara Indonesia itu dirubah atau disesuaikan dengan dinamika kehidupan bangsa. Karena apabila terus dipertahankan bukannya tidak mungkin perang saudara akan terus terjadi. Ide-ide dan pemikiran yang di usung oleh Hasan Tiro tentang negara serta bagaimana pemerintahan harus berkuasa bisa dikatakan selalu mengikuti kondisi dan kehendak rakyat. Sikap yang fleksibel yang dimiliki oleh Hasan Tiro

itulah yang bisa menjadi perekat persaudaraan serta spirit untuk terus memperjuangkan yang dianggap telah menjadi haknya, di samping itu sikap yang demikian dianggap bisa menjadi payung bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis. Atas dasar itulah kemungkinan besar Hasan Tiro menjadi salah satu tokoh yang memiliki pengaruh besar di Aceh.

B. Saran-Saran

Gambaran negara merupakan sebuah utopis jadi wajar seandainya semua manusia punya keinginan untuk mendirikan sebuah negara. Baik itu yang sifatnya atas nama agama, perorangan, maupun atas nama kelompok atau golongan. Cita-cita atau keinginan tersebut bisa saja terinspirasi karena melihat situasi dan kondisi yang dialami oleh rakyat, atau karena melihat potensi didrinya yang dirasa lebih berhak dan lebih mampu. Namun apabila mempunyai cita-cita mendirikan sebuah negara di dalam suatu negara yang di anggap telah sah keberadaannya, maka reaksi keras atau tuduhan menjadi sparatis itu akan menjadi konsekwensi logis yang harus di terima, yang bisa mengakibatkan perang saudara dan kesengsaraan sepanjang masa. Oleh karena itu, ada beberapa saran yang ingin penyusun sampaikan:

1. Persoalan federasi dan atau federalisme, sebenarnya merupakan persoalan klasik yang muncul kembali akibat dari kurang mampuan *plat form* negara kesatuan mengakomodasi dinamika perkembangan demokrasi dewasa ini. Dengan kenyataan ini, seharusnya semua pihak cepat meresponnya, sebelum munculnya permasalahan tersebut menggiring pada konflik persaudaraan.

Untuk itu wacana tersebut jangan dilihat sebelah mata apalagi sampai dikuburkan. Akan tetapi, harus terus diteliti dari berbagai sudut pandang, sampai mampu mencapai cita-cita demokrasi yang murni, yaitu keadilan, kesejahteraan, pemerintahan untuk rakyat.

2. Tuntutan perubahan bentuk negara dari negara kesatuan ke bentuk negara federasi maupun monarki yang di dengungkan (khususnya) oleh Hasan Tiro, yang terus bergulir sampai pada masa reformasi saat ini, hendaknya disikapi dengan arif dan bijaksana, serta dijadikan salah satu pertimbangan dalam menentukan peraturan pemerintahan maupun kebijakan-kebijakannya demi keberlangsungan dan kelestarian bangsa Indonesia kedepan.
3. Gagasan negara federasi yang ditawarkan Hasan Tiro merupakan salah satu bentuk dan usaha untuk menjawab permasalahan ketidak-adilan dalam menjalankan kekuasaan, yang telah lama dirasakan oleh sebagian rakyat Indonesia. Untuk itu segenap komponen bangsa hendaknya melakukan ijtihad politik dengan terus membuka wacana dan dialog, serta mencobanya, untuk mengetahui plus dan minusnya.
4. Sementara mengenai bentuk negara monarki yang ditawarkan oleh Hasan Tiro, pada dasarnya bersifat lokal (hanya di Aceh). Sekalipun demikian, di alam demokrasi seperti sekarang ini rakyat masih tetap menjadi tokoh utama dalam suatu negara. Untuk itu kekuasaan negara sepenuhnya tetap akan di tangan rakyat. Artinya

dengan penuh kerendahan hati hendaknya bentuk negara monarki tidak lagi menjadi pilihan, kecuali bila rakyat menghendaknya, kenapa tidak?.

5. Merubah sesuatu yang dianggap/dirasa tidak baik atau menyiksa adalah harapan dan keinginan hampir semua manusia, namun penganiayaan dan kekerasan bukanlah sesuatu yang dilegalkan dalam ajaran agama manapun. Untuk itulah jalan damai atau kompromi sangat dianjurkan dalam menyelesaikan konflik, ketimbang dengan cara yang anarkis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an /Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1974 M/1394 H.

B. Fiqih Siyasah

Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Widodo, L. Amin, *Fiqh Siyasah dalam Sistem Kenegaraan dan Pemerintahan*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Sumbangsih, 1994.

C. Islam dan Politik/Tata Negara

Amiruddin, M. Hasbi, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Aristoteles, *The Politics*, alih bahasa, T.A. Sinclair, Mary Land: Penguin Boks, 1969.

Assyaukanie, Luthfi, *Pengantar Wajah Islam Liberal di Indonesia*, Jakarta: JIL, 2002.

Binder, Leonard, *Islam Liberal : Kritik Terhadap Ideologi-ideologi Pembangunan*, alih bahasa, Imam Muttaqin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1986.

Busroh, Abu Daud, *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Al-Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka : Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*, cet. Ke- 1, Jakarta: Madani Press, 1999.

Al-Chaidar, Zulfikar Salahuddin dan Herdi Sahrasad, *Federasi atau Disintegrasi; Telaah Awal Wacana Unitaris Versus Federalis dalam Perspektif Islam Nasionalis dan Sosial Demokrasi*, Jakarta: Madani Press, 2000.

- Dahlan, Muhidin M., *Sosialisme Religius, Suatu Jalan Keempat ?*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2000.
- Dijk, Cornelis Van, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*, judul asli : *Under the Banner of Islam (the Darul Islam in Indonesia)*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1995.
- Esposito, John L., *Ancaman Islam Mitos atau Realitas*, (ter), (Bandung: Mizan, 1994.
- Gani, Sulistyati Ismail, *Pengantar Ilmu Politik*, cet. Ke-2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
- Hermawan, Emon, *Politik Membela Yang Benar : Teori, Kritik dan Nalar*. Yogyakarta: Klik®, 2001.
- HR., Syaukani, dkk., *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Isjwara, F., *Pengantar Ilmu Politik*, cet. Ke-7, Bandung: Angkasa, 1980.
- Iver, R. M. Mac, *Negara Modern*, alih bahasa Moertono, Jakarta: Aksara Baru, 1982.
- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyyah tentang Pemerintahan Islam*, alih bahasa, Masrohin, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Juniarto, *Sejarah Ketatanegaran Republik Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Kamaruzzan, *Relasi Islam dan politik : Perpektif Modernis dan Fundamental*, Magelang: IndonesiaTera, 2001.
- Kartodirdjo, Sartono, "Metode Penggunaan Bahan Dokumen", dalam Koentjaraningrat (ed), *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet. Ke-2, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Kurzman, Charles, (ed)., *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, cet. Ke- 1 Jakarta: Paramadina, 2001.
- Kusnardi, Moh. dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, cet. Ke-3, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1994.
- Lubis, M. Solly, *Ilmu Negara*, cet. Ke-1, Bandung: Alumni, 1975.
- M., Airlangga Pribadi, dan Yhudie R. Haryono, *Post Islam Liberal : Membangun Dentuman Mentradisikan Eksperimentasi*, Bekasi: Gugus Press, 2002.

- M. Din Syamsudin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: PT. Logos, 2000.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, cet. Ke-2, Jakarta: LP3ES, 1987.
- Madjid, Nurcholish, *Indonesia Kita*, Jakarta: Gramedia, 2004.
- Mahendra, Yusril Ihza, *Dinamika Tatanegara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan Rakyat dan Sistem Kepartaian*, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Mangunwijaya, Y. B., *Menuju Republik Indonesia Serikat*, Jakarta: Gramedia, 1999.
- Marbun, B. N., *Kamus Politik, edisi baru*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Masdar, Umarudin, *Membaca Pikiran Gusdur dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Maududi, Al, *Dasar Konstitusi Islam*, Salim Azam (ed), Bandung: Mizan, 1990.
- Maududi, Abu A'la Al, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, alih bahasa, Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1995
- Mudzhar, Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Pres, 1998.
- Mufid, Nur dan Nur Fuad, *Bedah al-Ahkam Sulthaniyah; Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abayiah*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2000.
- Mulia, Musdah, *Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haikal*, Jakarta: Paramadina, 2001
- Muthahhari, Murtadha, *Masyarakat dan Sejarah : Kritik Teori Islam atas Marxisme dan Teori Lainnya*, alih bahasa, M. Hashem, Bandung: Mizan, 1992.
- M.D., Moh. Mahfud, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Naning, Romdlon, *Gatra Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1983.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. Jilid I, Jakarta: UI-Prees, 1985.

Noer, Deliar, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*, Jakarta: Grafiti Press, 1987.

_____, *Pemikiran Politik di Negri Barat*, Bandung: Mizan, 1997.

Nuswantoro dan Daniel Bell, *Matinya Ideologi*, Magelang: InonesiaTera, 2001.

Pane, Neta S., *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka : Solusi, Harapan, dan Impian*, Jakarta: Grasindo, 2001.

Rais, Muhammad Amin, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan, 1995.

Rajak, Jeje Abdul, *Politik Kenegaraan: Pemikiran-Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyyah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1999.

Sabon, Max Boli, *Ilmu Negara: Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: Gramedia, 1992.

Samidjo, *Ilmu Negara*, Bandung: Amrico, 1986.

Raziq, Ali Abdur, , *Islam Dasar-dasar Pemerintahan : Kajian Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*. Alih bahasa, M. Juhdi Sudi, Yogyakarta: Jendela, 2000.

Situmorang, Victor, *Intisari Ilmu Negara*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta : UI Press, 1993.

Soehino, *Hukum Tatanegara, Sumber-sumber Hukum Tatanegara Indonesia*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Liberty, 1985.

_____, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1993.

Sulaiman, Isa, *Aceh Merdeka : Ideologi, Kepemimpinan dan Gerakan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000.

Susenno, Frans Magniz, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Negara*, Jakarta: Gramedia. 1994.

Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1992.

Syafi'ie, Inu Kencana, *Al-Qur'an dan Ilmu Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

_____, Inu Kencana. *Ilmu Politik*. cet. Ke-1, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Syam, Firdaus, *Amin Rais Politisi yang Merakyat dan Intelektual yang Shaleh*, Jakarta: Al-Kautsar, 2003.

Tamara, M. Nasir, dan Elza Taher (ed), *Agama dan Dialog Antar Peradaban*, cet. Ke-1, Bandung: Mizan, 1996.

Taufiq A, Tuhana., *Aceh Bergolak Dulu dan Kini*, Yogyakarta: Gama Global Media, 2000.

Tim Penyusun PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pendidikkan Kewargaan (Civic Education), Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ISIN Jakarta Press, 2000.

Tiro, Hasan Muhammad, *Demokrasi Untuk Indonesia*, Jakarta: Teplok Press, 1999.

Yusuf, M. Djali, *Perekat Hati Yang Tercabik, Jawaban atas Dinamika Persoalan, Refleksi Sosial Aceh, dan Sebuah Kesadaran Untuk Masa Depan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Zaidan, Abdul Karim, *Rakyat dan Negara dalam Islam*, alih bahasa, Muttahid Ajwar, Jakarta: Media Dakwah, 1984.

D. Kamus dan Ensiklopedi

ENSIKLOEDI..., *Ensiklopedi Indonesia*, Seri 4, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Houve, 1983.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, cet. Ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

E. Skripsi dan Buku-buku yang lain

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Bakker, Anton, dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi penelitian Filsafat*, cet. Ke-3, Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis, Desertasai*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Khumaeni, Ali, Konsep Negara Monarki Hasan Tiro : Tinjauan Fiqh Siyasah. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Maksun, Studi Perbandingan Pemikiran Imam Khomeini dan Kuntowijoyo tentang Negara dan Demokrasi, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Riono, Dendi, Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Negara Federasi (Studi Analisis Terhadap Pemikiran Amin Rais), skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Riswandi, Pergolakan Sipil di Aceh Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Gerakan Teungku Muhammad Daud Beureuh dan Hasan Muhammad Tiro). Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Solidin, Pergolakan Islam Politik di Indonesia : Studi Atas Gerakan Aceh Merdeka : Tinjauan Fiqh Siyasah. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1982.

F. Majalah, Jurnal dan Homepage

Adib Ach, M. Kholidul, "Menggugat Ambiguitas Relasi Agama – Negara di Indonesia", *Jurnal Justisia*, edisi 21. Th ke-X, 2002.

Ali, Mukti, "Penelitian Agama (Suatu Pembahasan Metode dan Sistem), *Jurnal al-Jami'ah*, No. 31-33 Tahun 1984, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1984.

"Biografi Hasan Tiro," http://www.wikipedia.Org/wiki/Teungku_Hasan_Muhammad_di_Tiro, akses 18 September 2006.

Patria, Nezar, "Hasan Tiro Nasionalisme Aceh dan Nasionalisme Negara", *Jurnal Mitra*, edisi 08, Agustus – Oktober 2001.

Schumann, Olaf, "Dilema Islam Kontemporer Antara Masyarakat Madani dan Negara Islam", *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*, Vol. I, No. 2, 1999.

Suharto, Rudhy, "Islam dan Tantangan Modernitas : Kajian Terhadap Metode Ijtihad Islam Liberal", *Jurnal al-Huda*, No. 6 Tahun 2002.

Syamsuddin, M. Din, "Antara yang Berkuasa dan yang Dikuasai: Refleksi atas Pemikiran dan Praktek Politik Islam", *Jurnal Al-Jami'ah*, Vol. 39, No. 1 Januari – Juni 2001.

Syamsudin, M. Din, "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam", *Jurnal Ilmu dan Budaya Ulumul Qur'an* No. 2 Vol. IV tahun 1995.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Daftar Terjemahan

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Halaman	Footnote	Terjemah BAB I
01	17	25	Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaanNya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
02	17	26	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
03	19	36	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu-bapak dan kaum kerabatmu....
			Bab III
04	80	29	Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan...
			Bab IV
05	96	6	Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaanNya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

06	102	14	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu-bapak dan kaum kerabatmu....
07	105	16	...dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu (maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiah lainnya, seperti urusan politik, ekonmi, kemasyarakatan dan lain-lain)....

B. Biografi Tokoh

AI – CHAIDAR

AI – Chaidar lahir di Lok Seumawe pada tanggal 22 November 1969. beliau menyelesaikan S1 jurusan Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UI tahun 1996, dengan skripsi berjudul "*Diskursus Politik Islam dalam Gerakan Darul Islam dan Moral Nasional Liberation Front*", dengan predikat memuaskan. Pengalamannya antara lain menjadi redaksi pelaksana bagi jurnal mahasiswa Ilmu politik dan sosial FISIP UI (1992-1994), ketua Lingkar Studi Kreatif Minority (LSCM) (1989-1993), sejak remaja beliau sudah menulis di berbagai media masa maupun jurnal ilmiah, selain itu menterjemahkan buku karangan Jack Sowards yang berjudul *Harakiri a Japanese Ritual Suicidia* (Harakiri Bunuh diri ala Jepang). Beliau juga sebagai Tim penulis buku, Bernas, koprasi dan politik Orde Baru: 70 tahun Bustanul Arifin. Sebagai ko-editor buku Pancaran Rahamat dari Arun LNG, 1998. salah seorang penulis buku *Kematian Lady Diana Mengguncang Akidah Umat Islam*. Serta penulis buku *Formasi Formatur : Jawaban terhadap Reformasi Total*. Beliau saat ini menetap di Jakarta Selatan.

Dr. ISA SULAIMAN

Dr. Isa Sulaiman dilahirkan pada tanggal 20 Juni 1951 di Aceh Selatan, setelah memperoleh gelar Doktor (*Dektorat de Troeiaeme Cicly*) dalam bidang Ilmu Sejarah pada EHAESS (Ecole Des Hautes Etudes and Sciences Sociales) Paris – Perancis, 1985. beliau cukup tekun mendalami sejarah Aceh Merdeka. Karyanya tentang revolusi sosial pemberontakan Darul Islam di Aceh telah diterbitkan pada tahun 1997, dengan judul *Sejarah Aceh Gugatan Terhadap Tradisi*. Disamping itu, terdapat tulisan-tulisan dalam wujud artikel dalam majalah Arsipel, Sinar Darul Salam dan Moun Mata, atau dalam beberapa buku yang berisi kumpulan karangan.

MUNAWIR SJADZALI

Munawir Sjadzali lahir di Klaten, 07 November 1925. beliau menamatkan sekolah menengah pertama / tinggi Mambaul Ulum Solo. Kemudian beliau menjadi guru di Ungaran semarang, beliau juga menyelesaikan studi lanjutannya di University of Exeter, Inggris, dan Masternya diperoleh pada George Town University, Washington DC, Amerika Serikat. Beliau memulai kariernya di Departemen Luar Negri sejak tahun 1950 di Texas, kemudian di Washington DC (1956-1959), di Colombo (1963-1968), Wakil Kepala Perwakilan RI di London (1971-1974), menjadi Duta Besar RI untuk Emirat Kuwait, Bahrain, Qatar dan Perseikatan Keamanan Arab (1976-1980).

Di dalam negri, kariernya di mulai pada Kabag Amerika Utara (1959-1963), Kabiro Tata Usaha, Pemimpin Deplu dan Dirjen politik Deplu sejak tahun 1980. beluai pernah menjabat Mentri Agama selama dua periode (1983-1988 dan 1988- 1993). Beliau adalah tokoh intelektual dan agama serta diplomat.

NETA S. PANE

Neta S. Pane dilahirkan di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 18 Agustus 1965. Ayahnya, Ender Pane seorang penulis cerita pendek, yang bermukim di Medan. Kakeknya, Kasim Siregar, pendiri surat kabar lokal “Suara Tapanuli” yang dibredel penjajah Belanda dan kemudian yang bersangkutan dibuang ke Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Neta S. Pane memulai karier jurnalistiknya disurat kabar “Merdeka”, di Jakarta pada tahun 1984. kariernya dimulai dari wartawan kriminal, wartawan budaya, hingga wartawan politik. Terakhir, beliau dipercaya menjadi Redaktur Pelaksana pada tahun 1990. Tahun 1992, kemudian beliau dipecat secara sepihak oleh pemilik surat kabar tersebut.

Kemudian Neta S. Pane bergabung dengan Poskota Grup untuk mempersiapkan pedirian tabloid “Aksi”. Disamping itu, beliau pun menjadi Redaktur Pelaksana surat kabar sore “Terbit” di tahun 1994. Saat kelompok Media Bakrie Grup mengambil alih surat kabar Berita Buana ditahun 1996, beliau diminta bergabung dan menjabat sebagai Redaktur Pelaksana.

Namun, di pertengahan 1999 beliau mengundurkan diri dari surat kabar Berita Buana, dan bersama sejumlah wartawan lainnya mendirikan GAMATPOL (Lembaga Pengamat Polri / Indonesia Police Watch), sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bersifat mengamati dan mengkritisi kinerja kepolisian.

Selain menjadi wartawan, Neta S. Pane juga aktif menulis artikel opini mengenai sosial, politik, dan masalah-masalah kemasyarakatan lainnya diberbagai media masa.

CURRICULUM VITAE

Nama : Ade Rahman Sidik
Tempat/Tanggal Lahir : Ciamis, 18 Maret 1981
Alamat Yogyakarta : Jl Ampel 11 B Papringan
Alamat Asal : Blok Lapang Sindangjaya No. 189 Rt 21/06
Sindangjaya Padaherang - Ciamis - Jawa Barat
46383

Orang Tua

Nama ayah : Ijo Kartijo
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Tiktik Kartika
Pekerjaan : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Sindangjaya (1989-1994).
2. Madrasah Tazhijiyah PERSIS Banjarsari (1994-1995)
3. Madrasah Tsanawiyah PERSIS Banjarsari - Banjar (1995-1998).
4. Madrasah Aliyah PERSIS Banjarsari - Banjar (1998-2001).
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001-2007).

Yogyakarta, 11 April 2007

Penyusun


Ade Rahman sidik